

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Keterbatasan modal usaha, infrastruktur jalan yang belum layak, serta akses listrik dan internet yang belum merata menjadi hambatan utama produktivitas sektor pertanian dan usaha mikro di pedesaan. Penelitian (Hadi, 2018) menunjukkan bahwa pada 2016 hanya sekitar 26,3% rumah tangga pedesaan yang memiliki akses internet. Akses internet yang rendah berdampak langsung terhadap pendapatan petani, sebagaimana ditunjukkan oleh (Abdulah et al., 2024) yang menemukan bahwa rumah tangga petani dengan akses internet memiliki peningkatan pendapatan secara signifikan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur fisik juga menjadi kendala. Pada penelitian oleh (Wahyuni, 2022) menunjukkan bahwa tingkat akses jalan aspal di pedesaan Indonesia masih rendah, sehingga menghasilkan biaya distribusi hasil pertanian yang cukup tinggi dan ketimpangan antar wilayah signifikan.

Keterbatasan akses terhadap subsidi pupuk dan bahan bakar (solar) bagi alat pertanian turut meningkatkan biaya produksi, sementara harga jual hasil panen sering anjlok ketika terjadi surplus pasokan (Maulina Ayu Lestari, Eny Fahraty, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa petani tidak hanya menghadapi kendala dalam proses produksi, tetapi juga dalam aspek distribusi dan stabilitas harga yang berdampak langsung terhadap pendapatan mereka.

Fenomena alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan hunian atau industri turut mempersempit ruang produksi pertanian. Fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Indonesia berlangsung cukup masif dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (2019) yang dimuat pada (Kompas.com, 2023), Indonesia kehilangan sekitar 100.000 hingga 150.000 hektare lahan sawah setiap tahun akibat konversi lahan untuk perumahan dan industri. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya kapasitas produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Di sisi

lain, urbanisasi tenaga kerja muda ke kota mengurangi regenerasi petani di desa, mobilitas petani muda memperlihatkan tantangan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia

Misalnya, di DIY tercatat sekitar 153 ribu petani meninggalkan sektor pertanian dalam dekade terakhir (Fahriz & Irkhami, 2025). Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah (2025) luas panen padi tahun 2024 di Jawa Tengah mencapai sekitar 1,55 juta ha, dan produksinya mencapai 8,89 juta ton gabah kering giling (GKG) (setara $\pm$ 5,11 juta ton beras) menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar kedua secara nasional (BPS JAWA TENGAH, 2025). Meskipun sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi di wilayah pedesaan dan menyerap banyak tenaga kerja, kesejahteraan petani masih relatif rendah. Nilai tambah dari aktivitas pertanian juga belum optimal karena mayoritas petani masih menjual hasil dalam bentuk mentah dan bergantung pada fluktuasi harga pasar. Menurut data (Kementrian Pertanian, 2024) kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional masih signifikan, namun produktivitas dan pendapatan petani tidak tumbuh seimbang dengan sektor lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi tenaga kerja pedesaan dan hasil ekonomi yang dihasilkan.

Masalah lain yang sering dihadapi di wilayah pedesaan adalah ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian primer dengan nilai tambah yang rendah dari hasil panen. Banyak petani mengalami kesulitan memperoleh harga jual yang layak ketika terjadi kelebihan pasokan atau gangguan rantai pasok. Selain itu, kondisi ekonomi-sosial yang lebih menarik di kota mendorong urbanisasi tenaga kerja muda dari desa ke perkotaan suatu dinamika yang memperkuat ketimpangan antar wilayah (Ibanez, 2024). Padahal, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan karakter sosial yang kuat, desa memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pendekatan kewirausahaan yang inovatif dan berbasis komunitas.

Kewirausahaan sosial berfokus pada penciptaan nilai sosial dengan model bisnis berkelanjutan, sedangkan kewirausahaan pedesaan menekankan pemanfaatan potensi lokal dan partisipasi komunitas. Keduanya dapat

diintegrasikan melalui model bisnis sosial yang berbasis pada sumber daya pedesaan. Integrasi kedua pendekatan ini diyakini dapat menjadi strategi efektif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa, terutama jika melibatkan aktor-aktor sosial lokal seperti lembaga keagamaan. Namun demikian, dalam praktiknya kedua pendekatan tersebut seringkali berjalan secara terpisah. Kewirausahaan sosial lebih banyak berkembang di wilayah perkotaan dengan pendekatan filantropi modern, sementara kewirausahaan pedesaan cenderung berfokus pada aktivitas ekonomi berbasis lokal tanpa integrasi nilai sosial yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan suatu model integratif yang mampu menghubungkan penciptaan nilai sosial dengan aktivitas ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, pemilihan lembaga keagamaan sebagai aktor dalam integrasi kewirausahaan sosial dan pedesaan bukan tanpa alasan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki jaringan masjid yang tersebar luas hingga ke tingkat komunitas terkecil. Selain itu, masjid umumnya memiliki potensi sumber daya sosial dan ekonomi yang signifikan, salah satunya berasal dari dana infaq, sedekah, dan partisipasi jamaah yang terkumpul secara rutin. Namun demikian, dalam banyak kasus, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara produktif untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, dan masih cenderung difokuskan pada kegiatan konsumtif atau operasional keagamaan semata. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk mengoptimalkan peran masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai institusi sosial-ekonomi yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat, termasuk dalam mendukung kesejahteraan petani di wilayah pedesaan.

Lebih lanjut, peran masjid dalam konteks pemberdayaan ekonomi telah mulai berkembang untuk menjadi motor penggerak ekonomi umat. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga dapat berperan sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi (D. Agustina & Saputra, 2021). Sejumlah masjid telah menginisiasi program produktif seperti koperasi syariah, pemberdayaan UMKM jamaah, hingga kemitraan dengan petani. Penelitian oleh (Faizal et al., 2023) menunjukkan bahwa masjid yang dikelola secara profesional mampu menjadi wadah pemberdayaan

ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar melalui kolaborasi berbasis nilai-nilai keislaman.

Salah satu contoh nyata penerapan konsep tersebut dapat ditemukan di Masjid Nurul Ashri, yang terletak di Deresan, Kalurahan Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid ini dikenal sebagai “masjid sahabat petani” karena sejumlah inisiatif konkret yang mengintegrasikan nilai sosial-keagamaan dengan kewirausahaan pedesaan. Masjid Nurul Ashri selain digunakan untuk sholat lima waktu, juga memiliki banyak program pemberdayaan masyarakat. Program unggulannya adalah mensejahterahkan petani melalui gerakan jasa titip (jastip) sayur serta pembelian langsung hasil panen dari petani.

Melalui kegiatan-kegiatan ini, Masjid Nurul Ashri secara nyata menjalankan integrasi antara kewirausahaan sosial (dengan menekankan nilai keadilan, partisipasi jamaah, dan kesejahteraan petani) dan kewirausahaan pedesaan (memanfaatkan potensi hasil tani lokal serta memperbaiki akses pasar).

Praktik Masjid Nurul Ashri menunjukkan bagaimana lembaga keagamaan dapat menjadi aktor ekonomi sosial yang mempertemukan nilai agama, sosial, dan ekonomi dalam satu model pemberdayaan. Inovasi seperti ini memiliki relevansi luas bagi pengembangan ekonomi pedesaan di wilayah DIY dan Jawa Tengah, yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian organik, agrowisata, dan ekonomi lokal berbasis komunitas (Irwantoro, 2023).

Namun, meskipun praktik seperti di atas telah berjalan cukup baik, kajian akademik yang secara spesifik meneliti bagaimana integrasi antara kewirausahaan sosial dan kewirausahaan pedesaan berbasis masjid masih terbatas. Belum banyak penelitian yang membahas bagaimana kolaborasi tersebut dikelola, faktor pendukung dan penghambatnya, serta dampak sosial-ekonominya terhadap petani maupun jamaah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengambil studi kasus Masjid Nurul Ashri Deresan Sleman dengan jaringan petaninya di DIY dan Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep model integrasi kewirausahaan sosial dan pedesaan, sekaligus menjadi model praktis yang dapat

direplikasi pada konteks serupa bagi pemberdayaan ekonomi berbasis lembaga keagamaan di wilayah pedesaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk integrasi antara kewirausahaan sosial dan kewirausahaan pedesaan yang dilakukan oleh Masjid Nurul Ashri Sleman?
2. Apa peran masjid dalam mengembangkan model kewirausahaan sosial bagi petani di DIY dan Jawa Tengah?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat integrasi tersebut?
4. Bagaimana dampak integrasi ini terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk integrasi antara kewirausahaan sosial dan kewirausahaan pedesaan yang dilakukan Masjid Nurul Ashri.
2. Mengexplorasi peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi petani.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat integrasi kewirausahaan tersebut.
4. Menilai dampak integrasi dari kolaborasi tersebut bagi masyarakat pedesaan.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep integrasi kewirausahaan sosial dan kewirausahaan pedesaan, khususnya yang berbasis nilai-nilai keagamaan.

B. Manfaat Praktis:

1. Memberi inspirasi bagi lembaga keagamaan (masjid, pesantren, dan lainnya) untuk berperan aktif dalam kewirausahaan sosial.
2. Menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam merancang kebijakan ekonomi pedesaan yang partisipatif dan berbasis komunitas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik kewirausahaan berbasis masjid di pedesaan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut:

1. Lokasi: Masjid Nurul Ashri Sleman dan petani yang berkolaborasi di wilayah DIY dan Jawa Tengah.
2. Fokus: Integrasi antara kewirausahaan sosial dan kewirausahaan pedesaan, bukan aspek teologis atau kegiatan ibadah.
3. Unit Analisis: Kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.
4. Metode kualitatif deskriptif dengan wawancara pada ketua takmir Masjid Nurul Ashri, Relawan Masjid Nurul Ashri, dan para petani sayur di Magelang, petani semangka di Purworejo, dan petani singkong di Gunungkidul yang pernah terlibat dalam program Masjid Nurul Ashri.
5. Periode waktu yang diteliti : Tahun 2023–2025 sejak awal program pemberdayaan masjid dengan petani dijalankan .

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka, memuat teori-teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.
3. Bab III Metode Penelitian, menjelaskan pendekatan, lokasi, subjek, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan, menyajikan temuan penelitian dan analisisnya.
5. Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

